

Gema Desa

Edisi VI Tahun 2019

MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Rakor Evaluasi dan Rencana Program
Dinas PMD Provinsi Jawa
Timur Bertugas Selaraskan
Program Nawa Bhakti Satya



*Wujudkan Desa Kepel
Jadi Desa Mandiri*

**Porang, Ikon
Komoditas
Baru di Desa
Kepel**



Gema Desa



04

RAKOR KOORDINASI DAN EVALUASI RENCANA PROGRAM
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Bertugas Selaraskan Program Nawa Bhakti Satya



BUMDESA IJEN LESTARI
Prospek Desa Wisata yang Harus Dikembangkan

23

PENGARAH: Ir Mohammad Yasin M.Si.
KETUA REDAKSI: Drs.Robiul Fuad, MM.,
REDAKTUR:
SEKRETARIS REDAKSI: Pandu Danuwara. SP
STAF REDAKSI: Sugeng Hariyadi, SE, Gusti Putu Mayun, SH, Mochamad Anas, SH, Dedy Agus Irwanto, SE, Suroto, Donny Marciano, S. Kom

Gema Desa adalah majalah yang diterbitkan setiap dua bulan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk memberi informasi tentang pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur secara komprehensif. Gema desa juga dimaksudkan sebagai media pembelajaran dan pemikiran yang kritis seputar pemberdayaan masyarakat dan Gende

Daftar Isi

02 Daftar Isi

03 Dari Redaksi

- Tahun 2019 Jatim Raih Banyak Prestasi

04 - 10 Laporan Utama:

- Rakor Evaluasi dan Rencana Program Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Bertugas Selaraskan Program Nawa Bhakti Satya
- Inovasi Seppeda Motor Sabet 45 TOP KOVABLIK Jawa Timur
- Transformasi Program Kerja Dinas PMD Provinsi Telah Menanti

11 - 12 Laporan Khusus

- Manfaatkan Dana BUMDesa, Watesari Resmikan Agrowisata Belimbing

13 - 19 Warta

- Sinergi Pemprov dengan LPNU Perkuat Ekonomi Melalui NUconomic
- Kuatkan BUMDesa Melalui Program Klinik BUMDesa
- Bangun Ekonomi Swadaya Lewat Potensi Wisata Desa

20 - 21 Profil Pasar

- Tambah Fasilitas, Pedagang Makin Banyak Berjualan di Pasar Pilang Desa Ngompro

22 - 23 Profil Desa

- Porang, Ikon Komoditas Baru di Desa Kepel

24 - 25 Profil BUMDesa

- BUMDesa Ijen Lestari
Prospek Desa Wisata yang Harus Dikembangkan

26 - 27 Jalin Matra

- Jalin Matra Bantu Penjual Kerupuk Bawang Tunanetra
- Kerajinan Rajut Misyati Didukung Jalin Matra
- Jasa Jahit Rubiah Dapat Dukungan Jalin Matra PFK

28 - 29 Tokoh

- Wujudkan Desa Kepel Jadi Desa Mandiri

30 Kembang Desa

- Tidak Kerepotan Meski Jadi Guru

31 - 32 Galeri

33 - 34 Dharma Wanita

- Bakti Sosial Untuk Memiupuk Jiwa Sosial

35 Resep

- Cemal Cemil Bola Ubi Kopong

ALAMAT REDAKSI:

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
A. Yani 152 C Surabaya,
Tlp. 031-8292591, 8282183,
Fax. 031-8292591





Tahun 2019 Jatim Raih Banyak Prestasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 menerima banyak penghargaan. Di antaranya sebagai Provinsi Terbaik dalam dukungan pelaksanaan Program Inovasi Desa. Hal ini membuktikan bahwa program inovasi desa telah masuk ke dalam tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Begitu juga dengan prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Di antaranya program Jalin Matra menjadi satu-satunya inovasi Pemprov Jatim yang masuk sebagai finalis United Nation Publik Service Award (UNPSA) 2020 yang merupakan ajang pelayanan publik tingkat dunia.

Dalam satu waktu sekaligus, kebanggaan bagi Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, yaitu berhasil mendapatkan penghargaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Regional II Jawa-Bali tahun 2019 yang diraih Kelurahan Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang sebagai juara II kategori Kelurahan, dan Desa Kepel, Kec. Kare, Kab. Madiun, sebagai juara III lomba desa kategori desa. Sebagaimana Desa Kepel dan Kelurahan Tulusrejo juga menyabet juara I Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai kategori masing-masing.

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur juga menyabet penghargaan dari Pemprov Jawa Timur terkait hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat A. Penghargaan TOP 45 Kovablik diberikan atas inovasi yang dicanangkan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bernama SistEm Pendataan PEmbangunan Desa & MOiNITORing (SEPPEDA MOTOR). Lalu mendapat penghargaan mengenai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 sebagai Badan Publik Menuju Informatif OPD Pemprov

Jatim yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Adapun prestasi lainnya terkait Inovasi Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dalam bidang kewirausahaan oleh Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Tuban; Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Di bidang penggunaan Teknologi Tepat Guna diraih oleh Desa Suger Lor, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.

Binaan BUMDesa Dinas PMD Provinsi Jawa Timur juga meraih penghargaan sebagai pengelola wisata terbaik melalui Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) Kementerian Pariwisata tahun 2019, yang memberikan penghargaan kepada Desa Wisata "Boonpring" Sanankerto dalam kategori pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; Wisata Alam Watu Rumpuk dan Pendakian Tapak Bima dalam kategori pelestarian budaya; serta Desa Wisata Kertosari dalam kategori pelestarian lingkungan.

Pada Lomba Desa Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi meraih juara III dan dinobatkan sebagai Desa Wisata Kategori Maju. Sementara Desa Dadapan, Kec. Pringlaku, Kab. Pacitan, meraih juara harapan II sebagai Desa Wisata Kategori Berkembang.

Menginjak di penghujung tahun 2019, telah banyak prestasi yang diraih oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Sinergi tidak akan ada apa-apanya tanpa keterbukaan koordinasi antara perangkat daerah maupun provinsi. Penghargaan yang diterima tidak semata-mata menjadi nilai kepuasan yang stagnan, melainkan untuk memacu semangat dan produktivitas pemerintah provinsi menuju kebaruan terbaik diikuti evaluasi.

Jatim Sejahtera, Jatim Berdaya, Jatim selalu di hati. (*)



Rakor dan Evaluasi Rencana Program Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Selaraskan Program Nawa Bhakti Satya

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan aktif mendukung Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun program SDGs disusun untuk melanjutkan konsep Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Target Pemerintah Provinsi dapat menurunkan persentase penduduk miskin perdesaan, di mana pada akhir tahun

2024 kemiskinan di perdesaan menjadi 11,37%. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan masih 14,57%. Dinas PMD Provinsi Jawa Timur juga mengemban tugas menuntaskan 361 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal.

“Konsep SDGs ini memang dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai, salah satunya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,” kata

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si, saat menyampaikan paparannya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Hotel The Sunan, Surakarta, (27/11).

Rapat koordinasi ini membahas tentang sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mewujudkan Nawa Bhakti Satya, juga untuk lebih meningkatkan koordinasi

dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2019 dan rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada 2020.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Keberlanjutan lingkungan dalam ketahanan terhadap bencana, dan meningkatkan kualitas agar keadilan bagi semua orang merata.

“Dari kesembilan program Nawa Bhakti dimaksud, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa telah menyelaraskan dalam Nawa Bhakti 1, Nawa Bhakti 7, dan Nawa Bhakti 9,” kata Moh. Yasin.

Dalam Nawa Bhakti 1, difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Fokus utamanya bekerja sama pada penanggulangan kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdalam). Dalam hal ini Dinas PMD Jawa Timur telah menyelaraskan pada program peningkatan usaha ekonomi desa kelurahan dengan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui Jatim Puspa dan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal.

Nawa Bhakti 7 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa serta restorasi

desa. Dinas PMD Provinsi juga bertanggungjawab mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah desa dan BUMDesa serta insentif inovasi desa. Dalam hal ini Dinas PMD Jawa Timur telah menyelaraskan pada semua program yang ada dengan ikon restorasi desa.

Nawa bhakti 9, berusaha mewujudkan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini Dinas PMD Jawa Timur telah menyelaraskan pada program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan festival desa.

Hal ini telah dirancang dengan matang melalui rapat koordinasi dalam menyamakan persepsi antara SKPD di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Rapat koordinasi ini diharapkan akan memperoleh keselarasan terkait dengan kebijakan-kebijakan

program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan desa antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan Nawa Bhakti Satya. (ara)



Transformasi Program Kerja Dinas PMD Provinsi Telah Menanti

TUGAS berat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah menanti selama lima tahun ke depan. Dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas menurunkan persentase penduduk miskin perdesaan yang ditarget pada akhir tahun 2024 kemiskinan perdesaan menjadi 11,37%. Tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan masih 14,57%.

Ditambah lagi mengemban tugas menuntaskan desa tertinggal sejumlah 363 desa dan desa sangat

tertinggal sejumlah 2 desa. Di Kabupaten Sumenep terdapat desa tertinggal terbanyak di Jawa Timur, yaitu 100 desa tertinggal, disusul kemudian Kabupaten Lamongan dengan 42 desa tertinggal.

“Hal ini menjadi pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Untuk itu perlu dioptimalkan dana desa untuk mengentaskan desa tertinggal. Pihak desa harus mencermati indeks ketahanan sosial, indeks ekonomi dan indeks ekologi,” kata Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si.

Bapeda Provinsi Jawa Timur,

dalam rakor, menyampaikan isu-isu strategis dan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Beberapa permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa di antaranya belum optimalnya pemberdayaan masyarakat daerah perdesaan dan daerah tertinggal, belum optimalnya kelembagaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi desa, belum optimalnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa, belum



optimalnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa.

Di lingkup Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2019 Bidang Bina Pemerintahan telah melakukan kegiatan pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan; evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; pembinaan perencanaan pembangunan desa; program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Maka yang dilakukan pada rencana kegiatan tahun 2020 antara lain melakukan pembinaan perencanaan pembangunan desa dan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa telah melakukan kegiatan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa tahun 2019; peningkatan kapasitas aparatur pemdes sehingga rencana kegiatan tahun 2020 akan melaksanakan pembinaan kapasitas aparatur pemdes. Seksi Administrasi dan Aset Desa tahun 2019 melakukan pembinaan pengelolaan administrasi pemdes, pembinaan penataan aset desa. Rencana kegiatan tahun 2020 akan dilaksanakan pembinaan administrasi dan aset desa.

Pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan telah melakukan kegiatan Pameran Kampung Kreasi Ekonomi Pedesaan, Lomba Video Kreatif PUEM dan Pelatihan Kewirausahaan, Jalin Matra BRTSM. Pada rencana kegiatan tahun 2020 akan melakukan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berupa

Pameran Kampung Kreasi, Garasi PUEM, Lomba Video Kreatif Ekonomi Pedesaan, SIDO PINTER (Sinau Ning Ndeso untuk Pengembangan Inovasi dan Kemitraan), pelatihan kewirausahaan, rakor PUEM.

Pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, kegiatan yang dilakukan tahun 2019 di antaranya melaksanakan Lomba Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur, rakor Pasar Desa, melaksanakan TOT Pengisian Database BUMDesa, lomba BUMDesa Tingkat Provinsi Jawa Timur, Temu Karya BUMDesa terbaik, Jambore BUMDesa, Bimtek Online Klinik BUMDesa dan Jalin Matra PK2. Rencana kegiatan tahun 2020 yang hendak dilakukan yaitu melaksanakan Lomba Pasar Desa, Temu Karya Pasar Desa, Restorasi Pasar Desa, Lomba BUMDesa, jambore dan Temu Karya BUMDesa, Sekolah Keliling Klinik BUMDesa.

Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dan Jalin Matra PFK. Rencana kegiatan tahun 2020 di antaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal melalui Desa Berdaya serta percepatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan dengan melaksanakan JATIM PUSPA.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat telah melakukan kegiatan Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Prov. Jatim, Puncak

BBGRM XVI dan HKG PKK ke-47 Prov. Jatim, Rakor Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Bimbingan Teknis Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Rencana kegiatan Tahun 2020 melakukan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik, Puncak Peringatan BBGRM & HKG PKK, Bimtek Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Workshop TP- PKK dan Kader PKK, Rakerda TP PKK Prov dan TP PKK Kab./Kota, Sosialisasi Program/Kegiatan PKK, Pelatihan TOT dan Advokasi.

Selain itu telah melakukan sosialisasi pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat generasi muda, OPD dan lembaga lain, sosialisasi desa wisata berbasis adat istiadat dan budaya dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat serangkaian dengan Festival Samin. Rakor Penyusunan Pendataan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Bimtek Penyusunan Regulasi Berkaitan dengan Lembaga Adat, Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Adat Desa.

Rencana tahun 2020 melaksanakan bimtek pembuatan Lembaga Adat Desa, Sosialisasi peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan desa, sarasehan bersama penggeliat adat istiadat, pelatihan dan FGD di setiap kabupaten.

Seksi Pendampingan Masyarakat juga telah mengadakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim Tahun 2019, Lomba KPM Berprestasi Prov. Jatim tahun 2019, Temu

Karya KPM Prov. Jatim Tahun 2019, melaksanakan Bimtek FKKPM Prov. Jatim Tahun 2019. Rencana kegiatan tahun 2020 melaksanakan Pelatihan KPM, Lomba KPM Berprestasi, Temu Karya KPM, Rakor FKKPM, Lokakarya KPM.

Pada Bidang Kerjasama Desa yang terdiri dari Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan telah melaksanakan Workshop Program Pemberdayaan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan Pedesaan, Bimtek Program Pemberdayaan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan Pedesaan, Lokakarya Dana Bergulir Masyarakat Ex. PNPM MPd. Melaksanakan Workshop Program Pembangunan Potensi Kawasan Pedesaan, Bimtek Program Pembangunan Potensi Kawasan Pedesaan, Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan. Pada

tahun 2020 akan dilaksanakan Lokakarya Penggalan Prukades, Lokakarya Pengelola Dana Bergulir Masyarakat di 5 Bakorwil, Bimtek Pengelola Prukades, Temu Bisnis Program Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Pedesaan, Srawung Desa, Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Tingkat Provinsi, Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Seksi Sarana Prasarana Desa telah melaksanakan FGD dan Lokakarya Program Pembinaan Pendayagunaan Sarana Pedesaan, Bimtek Program Pembinaan Pendayagunaan Sarana Pedesaan (Penyediaan Air Minum & Sanitasi), Rapat Koordinasi Program Pembinaan Pendayagunaan Sarana Pedesaan (Embung Desa), Rapat Evaluasi Program Sarana dan Prasarana Pedesaan. Tahun 2020, akan

dilakukan sosialisasi penyediaan air minum dan sanitasi, lokakarya pengelolaan embung desa, lokakarya pengelolaan pamsimas, bimtek pengelolaan dan pengembangan pamsimas.

Seksi Teknologi Tepat Guna mengadakan Rapat Koordinasi Pendayagunaan TTG, Workshop Pendayagunaan TTG, Pameran Pelayanan Publik, Pameran Jatim Fair. Gelar TTG Nasional, Workshop Inovasi TTG, Lomba Posyantek, Pembuatan Aplikasi D-Katalog TTG. Rencana tahun 2020 melaksanakan Rakor Program Peningkatan Kerjasama Desa Melalui Inovasi dan Pendayagunaan TTG, Rakor Evaluasi Program Peningkatan Kerjasama Desa Melalui Inovasi dan Pendayagunaan TTG Workshop Inovasi dan Pendayagunaan TTG, Pameran Gelar TTG, Pameran Jatim Fair, Lomba TTG.(ara)





Manfaatkan Dana BUMDesa, Watesari Resmikan Agrowisata Belimbing

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Republik Indonesia – Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., kunjungi Desa Watesari Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dalam peresmian Agrowisata Perkebunan Belimbing sebagai Program Pilot Inkubasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL), pada Sabtu siang, (23/11/19).

Melalui program PIID-PEL, Agrowisata Perkebunan Belimbing seluas 2 hektar ini diharapkan bisa menjadi percontohan atau

pilot project bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan perekonomian desa.

“Ini merupakan prioritas pengembangan adalah BUMDesa, untuk penguatan ekonomi kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden, targetnya adalah SDM,” terang Abdul Halim.

BUMDesa harus menjadi ikon ekonomi pedesaan. Dalam pencapaiannya, yang harus diutamakan adalah SDM, dengan 3 kunci utama yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ia juga

menambahkan, bahwa hakekat otonomi daerah terletak di desa, bukan kabupaten.

“Kabupaten lebih berupaya mensinergikan dan mengkoordinasikan kerja-kerja desa. Artinya, jika desa-desa sukses, kabupatennya pasti juga sukses. Jika seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo bisa mandiri, maka masyarakatnya akan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo – H. Saiful Ilah, S.H, M.Hum., menyambut baik program PIID-PEL yang akan membantu tiap desa



dalam pembangunan ekonominya. Setiap desa akan terdorong untuk terus berinovasi.

Menurut keterangannya, 2 unsur yang diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni melalui pembangunan APBDesa, khususnya dana desa. Saya berpesan kepada kepala desa untuk meningkatkan kemampuan mengaturnya secara efektif,” ungkap Saiful.

Selebihnya, inovasi dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan yang dilakukan desa-desa ini, dapat didukung dengan peningkatan teknis desa secara profesional.

Oleh itu, pihaknya berharap dari program PIID-PEL ini dapat menjawab kebutuhan desa-desa, termasuk penyerapan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa sekitar.

Dalam peresmian ini, Abdul Halim juga mengucurkan dana

bantuan sebesar Rp 1,3 miliar yang diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo dan Kepala desa Watesari, untuk pengembangannya.

Menurut keterangan Drs. Nur Cholidi, M.Pd., – Ketua BUMDesa, 60% dari dana tersebut atau setara dengan Rp 787 juta sudah dipergunakan untuk pembangunan olah belimbing dan gedung edukasi penanaman belimbing.

“40% sisanya akan digunakan untuk perampungan agrowisata, yaitu sentra oleh-oleh agrowisata yang diisi oleh dodol belimbing, keripik belimbing, taman bermain serta arena outbound,” tegas Cholidi.

Saat ini, sebanyak 3.500 batang pohon belimbing ditanaman menyebar, diantaranya 1.500 batang pohon ditanam di Tanah Kas Desa (TKD), 90 batang pohon di Water Mini Park Watesari, dan sisanya 1.910 batang pohon ditanam menyebar oleh masyarakat.

Hal ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di desanya. “Tujuan semua ini, tentunya mendorong dan membangun kapasitas perkembangan ekonomi di tingkat desa yang melibatkan kelompok usaha ekonomi,” tambah Cholidi.

Selain itu, sejumlah Rp 840 juta juga diberikan Agus Halim dalam rangka Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang akan disalurkan kepada 8 BUMDesa, dengan masing-masing Rp 50 juta untuk permodalan. 1 BUMDesa senilai Rp 100 juta untuk pengembangan, dan 2 BUMDesa lainnya sebesar Rp 170 juta untuk revitalisasi pasar desa. (nit)



Inovasi Seppeda Motor Sabet 45 TOP KOVABLIK Jawa Timur



Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus memantau dan memberi spirit untuk inovasi yang diciptakan OPD dan Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Jatim dalam mempercepat perwujudan layanan yang CETTAR di kalangan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada 47 perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim. Penyerahan Penghargaan SAKIP Perangkat Daerah serta Penganugerahan Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (3/12). Penghargaan Kovablik diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan Kemenpan RB Didit Noordiatmoko, Plt Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim, dan Kabiro Organisasi Pemprov Jatim.

Di samping itu, Gubernur Khofifah memberikan penghargaan TOP 45 kepada Dinas PMD Prov. Jawa Timur dengan inovasi Seppeda Motor. Prestasi yang membanggakan ini diterima secara langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Moh. Yasin, M.Si. Inovasi SistEm Pendataan PEmbangunan Desa & MOniTORing (SEPPEDA MOTOR) mendapatkan penghargaan TOP 45 Kovablik Inovasi Layanan Publik.

Sementara penghargaan yang diraih berbasis nilai akuntabilitas kinerja SAKIP yaitu Dinas PMD Prov. Jatim dengan predikat A (memuaskan) di

tahun 2019. Gubernur Khofifah Indar Parawansa, pada acara ini memaparkan beberapa program prioritas nasional. Antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transportasi ekonomi.

Khofifah meningkatkan pentingnya pendidikan kesetaraan terkait SDM jika ingin meningkatkan IPM. Sedangkan untuk infrastruktur ia menekankan bahwa bidang ini harus punya koneksitas dengan pelaku UMKM dan pariwisata. Sedangkan dalam hal inovasi, Khofifah mengajak percepatan pelayanan yang tidak cukup dengan teknologi, tapi juga dengan inovasi itu sendiri.

“Inovasi pasti akan menciptakan lompatan. Penggunaan teknologi pasti membuat percepatan. Kita tidak bisa berpikir linier, harus lateral. Pak Presiden Jokowi juga berpesan, kita harus bisa tidak lebih baik dari kemarin, tapi harus lebih baik dari negara lain,” kata Khofifah.

Terkait penyerahan SAKIP OPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019, Plt Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur memaparkan beberapa hasil penilaian dari beberapa OPD Provinsi Jawa Timur. Antara lain predikat terbaik AA (Sangat Memuaskan), yang diraih Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Timur. Untuk nilai A (Memuaskan) diberikan pada 45 OPD, dan predikat BB (Sangat Baik) diberikan pada 7 OPD.

“Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh masing-masing OPD di lingkup Pemprov termasuk Bakorwil di dalamnya. Sebetulnya, inovasi ini untuk mendorong agar layanan CETTAR bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Khofifah. Khofifah ingin hasil komunikasi dua arah antara Pemprov Jawa Timur dengan masyarakat bisa terbangun. Khofifah menilai di zaman yang sudah sangat erat pemanfaatan teknologinya, pemprov harus bersikap open mind untuk menerima masukan dari siapa saja dan mau untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Sesuai dengan pesan Presiden Jokowi pada peringatan HUT KORPRI ke-48 bahwa untuk percepatan layanan yang terpenting

bukan hanya dorongan terciptanya inovasi tetapi juga teknologi.

Khofifah menambahkan, baik inovasi layanan publik maupun SAKIP harus tetap terbangun sinergitas baik vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal yang dimaksud berarti antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara yang horizontal lebih mengarah pada koneksitas antara semua forkopimda. Sedangkan dalam salah satu prioritas program nasional khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Lewat koneksitas yang terbangun melalui infrastruktur jalan tol, jalan nasional, dermaga, sentra industri dan sebagainya maka diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, yang akan dibarengi dengan pertumbuhan UMKM baru.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kunwas Didid

Noordiatmoko mengatakan, dalam mengimplementasikan SAKIP dengan baik, instansi pemerintah harus dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran.

“Dalam penilaian SAKIP yang terpenting bukan hanya pada dokumentasinya, tapi lebih pada manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Serta mindset kita untuk mencapai kinerja yang diinginkan,” ujarnya.

Pihaknya, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang telah melakukan penilaian SAKIP di pemkab/kota di Jatim. Namun demikian, bagi yang hasil predikatnya meningkat misalnya dari B ke BB pihaknya tetap akan melakukan quality assurance.

“Saya harap ada rekomendasi yang disampaikan kepada kami, jadi bukan hanya sekadar SAKIP-nya dapat AA, A, atau BB. Dengan demikian, kami bisa berbenah untuk menjaga dan meningkatkan kinerja terbaik. Dengan demikian, semua OPD bisa berpeluang masuk kategori AA,” harap Khofifah. (*)





Sinergi Pemprov dengan LPNU Perkuat Ekonomi Melalui NUconomic

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi pemerintah pusat menjadi prioritas yang utama. Seperti yang sedang dilaksanakan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, bersama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jatim, bersama Pemkot Batu serta didukung oleh Among Tani Foundation, dalam menggelar NUconomic Sinergi Ekonomi Umat di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu, Rabu (6/11) siang.

Ada 100 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Malang Raya, dan Pasuruan Raya menjadi peserta

pelatihan melaksanakan materi kewirausahaan di gedung Among Tani. Kegiatan NUconomic dibuka langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si, Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.Si, dan Ketua PW LPNU Jatim, H. Fauzi Priambodo M.Med. Kom. Diluncurkannya program “NUconomic” ini merupakan konsep gerakan ekonomi umat yang memuat prinsip-prinsip penjabaran dari maklumat pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari pada teks deklarasi Nahdlatut Tujjar.

Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad

Yasin, M.Si menyampaikan bahwa pelatihan yang dikemas dalam program NUconomic ini merupakan pengembangan dan peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha di kawasan pedesaan sehingga nantinya terjadi pemerataan ekonomi tingkat ekonomi di desa dan kota. NUconomic merupakan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan sesuai dengan misi Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya agar tercipta one village one product.

“Pelatihan ini adalah bukti jika semua elemen di Jawa Timur kompak dan bersatu dalam

membangun ekonomi kerakyatan. Semua elemen di Jawa Timur bersinergi untuk membangun ekonomi umat,” ujar Yasin pada pidato pembukaannya.

Sinergi yang terbentuk ini sama-sama menggerakkan ekonomi warga itu selaras dengan program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yakni Jatim Sejahtera dan Jatim Berdaya. Fokus Jatim Sejahtera tidak lain adalah upaya pengentasan kemiskinan khususnya di perdesaan sehingga secara berkesinambungan dapat mengurangi disparitas ekonomi di antara desa dengan kota.

Sementara Jatim Berdaya, yaitu upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM, BUMDesa dan Produk Unggulan Desa. Pelatihan kewirausahaan

tersebut difokuskan pada tema strategi pergerakan ekonomi dan sertifikasi produk halal. Dengan menjadikan Dinas PMD Prov. Jawa Timur sebagai fasilitator yang memberikan stimulus pembiayaan kegiatan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Sementara Among Tani Foundation juga memiliki idealisme dan jaringan dengan UMKM hingga terbentuklah sinergi berbentuk NUconomic ini. Ini juga menjadi salah satu misi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bekerja sama dengan NU.

Pasalnya NU merupakan organisasi keagamaan yang anggota atau jamaah banyak berada di pedesaan. Dengan jangkauan yang mampu

dimaksimalkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Namun yang jadi persoalan, sekitar 80% hingga saat ini pemanfaatan dana desa masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan SDM seperti pelatihan bagi pelaku UMKM hingga peningkatan fasilitas Posyandu untuk menekan stunting.

“Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM dan pemberian pelatihan seperti ini juga bisa dimaksimalkan melalui Dana Desa (DD) yang digelontor dari pusat. Pada tahun ini dana desa yang digelontor Rp 7,4 triliun dan tahun depan ditingkatkan menjadi Rp 7,6 triliun,” tutur Yasin.



“Tak hanya melalui pelatihan dari dinas terkait. Tapi masyarakat juga bisa mengusulkan berbagai pelatihan peningkatan SDM di tingkat desa melalui Musrenbang tingkat desa sehingga kemiskinan di Jawa Timur yang tertinggi di Indonesia bisa dikurangi.”

Sementara itu, Ketua PW LPNU Jatim, H. Fauzi Priambodo M.Med. Kom menambahkan bahwa Kota Batu digelar sebagai tempat grand launching sekaligus role model program NUConomic di Jawa Timur. Di Kota Batu, para pelaku UMKM terus bertumbuh dan menjadi juara 1 UMKM terbaik di Jawa Timur.

Perihal target kegiatan ini Fauzi Priambodo dalam pernyataan lain mengungkapkan, “Targetnya tidak muluk-muluk, sebagai pondasi awal adalah pembentukan mental. Kemandirian itu lahir dari mental yang kuat, bukan hanya dari modal

yang kuat. Mental pun harus didasari oleh niatan yang baik. Nah, perpaduan antara mental yang kuat dan niatan baik serta kerja keras akan membuahkan hasil yang optimal,” tuturnya. Ia juga berpendapat bahwa label produk halal diperlukan sebagai benteng serbuan produk-produk asing yang terus membanjiri pasar lokal.

Dalam konsep NUConomic, LPNU Jawa Timur mengembangkan misinya. Seperti, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Memperkuat serta memfasilitasi pengembangan jejuring (networking) pengusaha NU agar dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi warga nahdhiyin dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, mendukung dan mewujudkan perkembangan

program ekonomi mikro rintisan berbasis pesantren. Mendukung dan mewujudkan perkembangan rintisan usaha-usaha kecil dan menengah. Serta, mendorong lahirnya unit usaha di sektor riil, baik di tingkat PWNU maupun PCNU.

Gerakan ekonomi tersebut berisi lima prinsip gerakan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah kolaborasi kalangan profesional, agamawan dan masyarakat sebagai pondasi kesuksesan badan usaha. Kemudian profesional dengan tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan diberikan pelatihan berupa pendampingan, support teknologi, marketing, hingga money yang direncanakan dengan program pelaksanaan selama lima tahun. (ara)





Kuatkan BUMDesa Melalui Program Klinik

PROGRAM Jatim Berdaya yang merupakan salah satu program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya melalui program icon kemitraan UKM & BUMDesa salah satunya yaitu membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Dengan adanya BUMDesa, menambah harapan baru agar dapat mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim. Selain itu, di dalam program-programnya, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan. Namun sejauh ini, baru sekitar 10% BUMDesa berjalan dengan baik atau baru 431 BUMDesa yang masuk kategori

maju dan berkembang. Sementara sisanya masih di level rintisan atau baru memulai.

Program Klinik BUMDesa merupakan salah satu program Pemprov Jatim yang berupaya mengoptimalkan akselerasi pembangunan melalui desa sebagai ujung tombak. Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 khususnya Bab X, pasal 87-90, keberadaan BUMDesa bermanfaat untuk pengembangan usaha, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maupun pemberian bantuan khususnya bagi masyarakat miskin. Tercanaungnya klinik BUMDesa adalah salah satu program

Pemprov Jatim yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di kantong-kantong kemiskinan Jatim melalui penguatan ekonomi desa dengan memaksimalkan BUMDesa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M. Yasin menjelaskan, program BUMDesa ini adalah komitmen Gubernur Khofifah untuk memberdayakan desa melalui BUMDesa. Karena itu semua potensi yang ada digerakkan dan diarahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dalam pengembangan BUMDesa.

M. Yasin menyebut sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan



yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa, diantaranya Taveloka, PT. HM. Sampoerna dan BUMN PT POS Indonesia. Bantuan yang diberikan berupa bantuan program dan pelatihan. Namun bantuan-bantuan lainnya akan diberikan seperti pendanaan maupun perangkat lunak. Peran pihak swasta dalam lini ini dapat membantu BUMDesa dalam bidang pemasaran produk.

“Dengan adanya Klinik BUMDesa ini, kami berharap hingga 2024 ada 25% BUMDesa yang dalam kategori sehat dan berkembang,” tandas Yasin.

Fahrul Muzaqqi, selaku Direktur Program Klinik BUMDesa memberikan sosialisasi mengenai klinik BUMDesa di kantor Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Ia mengungkapkan dalam rangka penguatan BUMDesa, Pemprov Jatim membentuk program Klinik BUMDesa. Klinik BUMDesa ini

memberikan pendampingan, pelatihan dan saran teknis kepada BUMDesa agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga perekonomian di desa bisa berputar dan bisa mendatangkan PAD untuk desanya masing-masing. Klinik BUMDesa akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis agar BUMDesa bisa berkembang.

“Hari ini kita memberikan sosialisasi kepada 20 BUMDesa penerima manfaat. BUMDesa ini dipilih dari 10 Kabupaten yang berbeda. Nantinya ini bisa menjadi percontohan bagi BUMDesa lainnya,” ungkap Fahrul.

Ke depannya, Klinik BUMDesa ini akan melibatkan seluruh BUMDesa di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dalam program

penguatan BUMDesa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pendampingan agar tidak wajib datang jauh-jauh ke pemerintah pusat. Tentunya hal itu juga bisa mengurangi biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan BUMDesa.

“Bakorwil dan peneliti kita libatkan dalam pengembangan BUMDesa. Hal ini penting agar prosesnya bisa terarah dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Klinik BUMDesa juga bersinergi dengan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUMDesa. Dengan melibatkan peneliti yang memiliki keahlian, maka pendampingan bisa lebih maksimal dan tepat sasaran atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengasah potensi sumber daya manusia di masing-masing BUMDesa. (ara)



MENATA manajemen keuangan dan manajemen pengadaan bagi sebagian usaha menjadi pilar penting kesuksesan itu bisa diraih. Maka yang perlu dilakukan setelah manajemen keuangan telah tersedia, bagaimana caranya mengembangkan usaha itu agar diterima di pasar masyarakat, termasuk wisata desa yang kian hari masyarakat desa makin marak menonjolkan wisata desanya kepada wisatawan. Menjamurnya wisata desa yang ada di Jawa Timur

Bangun Ekonomi Swadaya Lewat Potensi Wisata Desa

pun tidak bisa lepas dari peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur.

Melalui BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), semua desa yang ada di Jawa Timur bisa berlomba membangun serta menciptakan desa wisatanya masing-masing. Dari total 7.724 desa, yang memiliki BUMDesa baru 5.432 desa. Meski tidak juga dipaksakan untuk membangun desa wisata, namun memanfaatkan potensi desa dirasa perlu agar masyarakat mendapat manfaatnya.

Tidak hanya berhenti disitu, Dinas PMD Prov. Jatim terus mengawal pelaku usaha BUMDesa mulai dari nol hingga pembinaan selanjutnya. Seperti yang diadakan sekarang, Kepala Dinas PMD Prov Jatim, Ir. Moh Yasin, M.Si membuka kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Wisata Desa, pada

Senin 28 Oktober 2019 di Hotel Ollino Garden Malang.

Bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang dan BUMDesa Pujon Kidul Malang, Ir. Moh. Yasin, M.Si, selaku Kepala Dinas PMD Prov. Jatim telah membuka pelatihan kewirausahaan bagi unit usaha BUMDesa yang mengelola potensi wisata yang diikuti oleh 100 orang perwakilan pelaku BUMDesa dari Kab se-Jatim dan Kota Batu. Dihadiri pula pembicara dari Dinas Kehutanan Prov. Jatim yang menjelaskan tentang pengembangan wisata desa pada wilayah Perhutani. Peserta dapat informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang disampaikan Dinas Kehutanan Prov. Jatim.

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur terus mendorong BUMDesa yang memiliki unit usaha pengelolaan potensi wisata agar dapat memiliki manajemen destinasi wisata yang baik,





menemukan ruang pemasaran yang menjanjikan dan membuka ruang usaha bagi masyarakat desanya sehingga akan mampu berkontribusi terhadap PADesa yang berujung pada desa secara mandiri dapat mengelola

pembangunan desanya.

“Ternyata desa kalau diberi kewenangan, itu luar biasa sekali kreatifitasnya. Jangan hanya dibuat untuk membangun jalan, jembatan, pagar, balai desa. Sudah saatnya juga membangun

SDM dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan lainnya. Ayo bangun ekonomi, ada peluang uangnya kita investasikan,” ungkapnya.

Pemateri Mangku Purnomo, SP, M.Si. Ph. D yang berasal dari Universitas Brawijaya pun juga menyampaikan kiat-kiat dalam bagaimana caranya menghitung harga tarif objek wisata dan menetapkannya menjadi sebuah tarif masuk. Lalu pemateri Birly, Ph. D, memberikan materi mengenai pemasaran destinasi wisata desa melalui online ataupun

offline. Pelatihan yang diadakan bertujuan untuk memberi bekal para anggota BUMDesa untuk bisa mengembangkan ekonomi melalui usaha desa seperti wisata alam, wisata budaya maupun wisata produk unggulan. (ara)





Pasar Pilang Desa Ngompro Tambah Fasilitas, Pedagang Makin Banyak Berjualan

KABUPATEN Ngawi secara geografis berada di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai jalur penghubung antar provinsi merupakan potensi kewilayahan yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan di sektor perekonomian. Topografi memiliki potensi agraris sebagai produsen hasil bumi baik tanaman pangan dan hortikultura, serta potensi perdagangan barang dan jasa, baik sebagai pelaku utama maupun

sebagai perantara/jalur distribusi.

Secara keseluruhan, pasar desa di Kabupaten Ngawi berjumlah 41 lokasi. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, pasar desa mengalami peningkatan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pertambahan penjual dan pembeli menjadikan lokasi pasar tidak mampu menampung kegiatan transaksi dengan baik, hal ini mengakibatkan menumpuknya pedagang dan barang. Beberapa pedagang yang tidak tertampung mulai menyebar di luar area pasar yang membuat area pasar

semrawut.

Kondisi di beberapa pasar desa saat ini tidak mempunyai utilitas primer pendukung, seperti area parkir untuk kendaraan, hal ini mengakibatkan terhambatnya arus sirkulasi kegiatan pasar dan membuat simpul kemacetan lalu lintas, sehingga diperlukan penataan dan pengembangan areal pasar tersebut untuk meningkatkan sarana pelayanan dan kegiatan yang lebih baik agar menjadi pasar sentra tersier sebagai pusat perbelanjaan tingkat wilayah kecamatan kota yang melayani

lingkungan penduduk di sekitarnya dengan kegiatan perdagangan secara eceran atau agen.

Seperti Pasar Pilang Desa Ngompro. Di tahun 1948, sempat terjadi kebakaran di Pasar Manggong yang disebabkan oleh pembakaran pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu. Perlahan-lahan banyak para pedagang yang berpindah berjualan di Pilang yang kemudian akhirnya diberi nama Pasar Pilang Desa Ngompro. Awal mulanya, pasar Pilang Desa Ngompro dulunya hanyalah warung-warung kecil di pinggir jalan, yang ramai dikunjungi orang-orang di waktu malam hari, di sebelah timur ada sebuah lumpur besar. Seiring dengan berjalannya waktu Pasar Pilang Desa Ngompro menjadi ramai dan merupakan pusat jual beli di wilayah Kawedanan Padas, semakin lama pedagang yang masuk ke Pasar Pilang tidak hanya dari pedagang lokal, namun yang lebih banyak meramaikan Pasar Pilang adalah pedagang dari luar wilayah Kawedanan Padas, bahkan sampai dari luar wilayah Kabupaten Ngawi, seperti Madiun, Magetan, Nganjuk.

Dengan perkembangan pemekaran wilayah Kabupaten Ngawi menjadi adanya Kecamatan Pangkur, maka Desa Ngompro yang dulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Kewadungan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pangkur, sehingga jalan di depan Pasar Pilang Desa Ngompro menjadi jalan poros penghubung Kabupaten Ngawi dan Kecamatan Pangkur bahkan merupakan jalan alternatif menuju Kabupaten Madiun. Hal ini menambah ramainya aktivitas perdagangan di Pasar Pilang Desa Ngompro.



Pasar Pilang Desa Ngompro mendapatkan bantuan pembangunan oleh Pemerintah Pusat melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2008 sehingga los yang ada di dalam Pasar Pilang Desa Ngompro yang dulunya terbuat dari kayu jati dan bambu sekarang sudah berubah menjadi bangunan modern yang memadai. Di tahun 2010 Pasar Pilang Desa Ngompro juga mendapatkan bantuan lagi dari Pemerintah Pusat melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan, dan bantuan dari Pemprov Jawa Timur melalui program sarana prasarana pedesaan untuk melanjutkan pembangunan los di dalam Pasar Pilang Desa Ngompro.

Sarana dan prasarana Pasar Pilang terbilang berkembang dengan baik dan bagus. Hal ini juga mempengaruhi arus peningkatan kegiatan perdagangan di Pasar



Pilang. Serta membuat banyak pedagang yang ingin berjualan baik di los maupun kios Pasar Pilang Desa Ngompro. Melihat semakin banyaknya permintaan pedagang dari luar daerah dan pedagang lokal untuk bisa berdagang di lokasi Pasar Pilang Desa Ngompro, Pemerintah Desa Ngompro berinisiatif untuk membangun dan merenovasi bangunan kios depan dan samping Pasar Pilang Desa Ngompro.

Dalam tahap ini, juga ditambah bangunan los di dalam Pasar melalui kerjasama dengan BPM dan koperasi di tahun 2013 hingga terciptalah kondisi fisik Pasar Pilang Desa Ngompro yang seperti sekarang ini. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 215 pedagang dengan 25 komoditas yang ada. (ara)

Porang, Ikon Komoditas Baru di Desa Kepel



AWALNYA, komoditas unggulan yang dihasilkan Desa Kepel merupakan sentra perkebunan durian, alpukat, manggis dan sentra pertanian seperti cengkeh. Sekitar tahun 2010, warga Desa Kepel Kec. Kare mulai belajar tentang porang ke Desa Klangan. Awal menanam, porang tidak tumbuh sesuai yang diharapkan. Faktor ini terjadi karena struktur geografis di Desa Kepel, namun tidak menyerah, akhirnya Desa Kepel berhasil menanam porang hingga saat ini menjadi ikon dari desa daerah pegunungan Wilis ini.

Desa Kepel, Kec. Kare, Kab. Madiun berada di 600 mdpl yang terletak di daerah pegunungan Wilis. Berbatasan dengan Desa Kare, Desa Bolo, Desa Bodag, Desa Kuwiran, dan area selatan berbatasan langsung dengan Kab. Ponorogo, membuat Desa Kepel cocok untuk ditanami komoditi buah-buahan. Namun ada yang berbeda, di tahun 2010, warga Desa

Kepel mencoba mencari peluang yang ada dengan mempelajari porang.

Di Kabupaten Madiun, khususnya di daerah Klangan, Saradan, dikenal menjadi penghasil porang. Dari sanalah dimulainya warga Desa Porang belajar. Setelah mengetahui manfaat porang untuk kebutuhan mendatang, kini petani di Desa Kepel pun menambah komoditas untuk dipanen di lahan seluas 400 hektar tersebut.

“Kami tidak menghilangkan komoditas buah-buahan yang biasa ditanam petani, kami menambah komoditas porang sebagai penghasil tambahan,” tutur Sungkono, S. Sos., Kepala Desa Kepel berusia 38 tahun ini.

Desa ini terbilang baru menggeluti budidaya porang. Setelah belajar menanam dan memanen porang kian dirasa menguntungkan bagi petani,

petani terus menambah komoditi di sekitar lahan panen untuk membudidayakan porang. Pasalnya, porang merupakan tanaman yang tidak repot untuk dibudidayakan. Sekali menanam bisa panen 4 kali berturut-turut, dan dalam satu kali panen petani bisa mendapat keuntungan 3 kali lipat dari komoditas lainnya.

Sungkono juga mengungkapkan bahwa telah menghitung biaya produksi untuk menanam porang di daerahnya, lalu penghasilan yang didapatkan berapa, harga dipasaran pun juga telah dikaji dan dirumuskan agar bisa mensejahterakan petaninya. Dan terbukti, petani bisa mendapatkan keuntungan dari menanam porang tersebut. Usaha sampingan yang menguntungkan ini pun juga merambat ke sektor usaha lainnya.

Sembilan tahun menggeluti budidaya porang hingga berhasil



membawa petaninya pergi umroh, Desa Kepel jadi dikenal sebagai pusat budidaya porang. Banyak wisatawan yang akhirnya berwisata edukasi porang kepada petani porang, salah satunya Paidi, petani viral yang sukses menanam porang. Dari banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk edukasi porang, sekelompok petani pun membuka sektor usaha paket edukasi. Paket edukasi yang ditawarkan bermacam-macam, ada yang berbentuk perorangan, kelompok pelajar, bahkan ada paket yang menyediakan tempat bermalam plus wisata alam menawan di Gligi Park, salah satu wisata desa yang sedang dikembangkan.

Edukasi yang diberikan pun juga melibatkan petani porang untuk bisa menjadi tour guide meliputi bagaimana cara menanam, memupuk, hingga pascapanen. Usaha paket edukasi ini telah dijalankan oleh Gapoktan Sarwo Asih. Namun, Kepala Desa Kepel Sungkono mengatakan, paket studi yang dibuat Gapoktan Sarwo Asih akan dijadikan dalam unit BUMDesa Desa Kepel. Hal ini diperuntukkan untuk memberikan penyertaan modal hingga berdiri

Pusat Edukasi Porang Indonesia di Kab. Madiun karena selama ini belum bisa menyokong terkait penyertaan modal usaha BUMDesa di bidang porang atau kelompok tani ini. Selama ini unit usaha BUMDesa Desa Kepel yang didirikan pada tahun 2016 ini hanya meliputi unit usaha perdagangan, unit usaha simpan pinjam, unit usaha air minum, dan unit usaha pariwisata. Dan rencana ke depannya akan ditambah unit usaha baru.

Tak hanya itu, anak-anak yang lulus SMA pun sekarang sudah banyak diajari menanam porang. Dengan demikian, anak-anak yang lulus SMA namun tak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tidak perlu lagi mencari kerja ke luar negeri tetapi bisa ikut membudidayakan porang. Kebanyakan satu rumah di Desa Kepel hanya menghasilkan satu lulusan SMA. Sungkono berharap, dengan adanya budidaya porang ini, semakin naik harga porang akan menghasilkan satu sarjana untuk satu rumah.

Sungkono sebagai kepala desa sendiri tidak pernah berpikir jauh akan mendapatkan prestasi dari pemerintah pusat. Di tahun 2019,

Desa Kepel meraih dua prestasi sekaligus. Pertama diberikan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Regional tahun 2019 yang meraih juara 3 tingkat nasional. Kedua, menjadi juara pertama lomba desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Mewakili desanya, Sungkono sangat bangga atas prestasi yang sudah diraih, terutama pasca lomba. Dirasakan betul oleh desanya bahwa pemerintah sering membina dan memonitoring keadaan desa agar tertata lebih baik. Mulai dari sistem administrasi desa, hingga ke potensi unggulan yang membawa Desa Kepel makin dikenal sebagai pusat porang.

“Pasca lomba inilah yang sebenarnya menjadi lomba sesungguhnya,” tutur Sungkono. Ia berharap mampu memberi inspirasi kepada desa-desa lain bahwa memiliki tata kelola keuangan dan sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan jauh lebih efektif untuk menjadi desa yang mandiri. (ara)



BUMDesa Ijen Lestari

Prospek Desa Wisata yang Harus Dikembangkan

BERADA di daerah pegunungan, menjadikan udara terasa sejuk dan segar yang melingkupi Desa Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi. Secara geografis desa ini terletak di kawasan gunung Ijen, sehingga menjadikan desa ini dilalui oleh arus wisatawan menuju Gunung Ijen. Setelah diamati, Desa Tamansari mempunyai potensi wisata yang cukup besar. Hal inilah yang menjadi salah satu pemikiran sebagian masyarakat disana, tentang bagaimana mengembangkan potensi yang ada.

Bersama dengan Kepala Desa, dibantu oleh Bambang Hadi S, salah satu tokoh masyarakat di Desa Tamansari mencoba merumuskan agar potensi ini dapat terus berkembang dan berkontribusi secara nyata baik berupa PAD maupun ekonomi masyarakat secara langsung.

Pada tahun 2015, dengan terbitnya Perdes tentang BUMDesa, BUMDesa Ijen Lestari pun berdiri pada tanggal 16 Januari 2015. Bambang didaulat menjadi Ketua BUMDesa. Menurut Kepala Desa Tamansari, bukan perkara mudah dan instan dalam mendirikan BUMDesa. Hal terumit dalam proses pendirian adalah proses penyusunan Perdes, karena harus dikonsultasikan kepada pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan, mengingat

hal tersebut adalah hal relatif baru pasca diundangkannya Undang Undang nomer 6 tentang desa tahun 2014.

Di awal berdirinya BUMDesa mengalami hambatan seperti tidak adanya modal diawal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan pro kontra terkait unit pertamanya yakni retribusi masuk kawasan desa wisata.

Saat ini, BUMDesa Ijen Lestari mempunyai 7 unit usaha yang sudah berjalan, yang semua berbasis pada wisata diantaranya retribusi kawasan ijen, pengelolaan rest area, homestay, transportasi wisata serta packaging produk UMKM masyarakat.

“Banyak wisatawan di Desa Tamansari yang menginap di homestay milik warga sebelum naik Gunung Ijen. Dari satu kamar yang disewa untuk wisatawan, pemilik rumah akan membayar Rp 10.000 pada BUMDesa. Sedangkan untuk harga kamar rata-rata antara Rp 150.000 sampai Rp 200.000 per malam. Kami bantu jualkan kamar mereka lewat online dan media sosial,” kata Bambang.

Rata-rata pemilik homestay bekerja sebagai petani dan penambang. Pihak BUMDesa



juga turut membantu penyewa kamar untuk memberikan edukasi mengenai pelatihan pelayanan dan tata cara menata kamar yang baik dan nyaman.

“Minimal kamarnya bersih, rapi, ada tempat tidur, lemari, dan meja. Tidak harus mewah,” jelasnya.

Kerjasama antara warga dan BUMDesa terjalin sangat kekeluargaan. Warga yang berkontribusi menyewakan kamarnya sebagai homestay pun bisa membayar kontribusi kepada BUMDesa kapan saja, tidak terbatas waktu. Dalam kurun waktu 2 tahun, BUMDesa Ijen Lestari mengalami pengembangan yang cukup signifikan. Omset dari tahun 2016 sebesar Rp 5.397, lalu di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 81 juta. Jumlah



Dana Desa sebesar Rp 150 juta.

Proses pendirian BUMDesa terencana baik, tidak tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kelayakan usaha, terlebih proses pengembangan unit usahanya. Pertanggungjawaban yang jelas, transparansi anggaran dan pengelolaan, menjadi faktor semakin dipercayanya Bumdesa oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Adanya aktor penggerak desa

pekerjanya sendiri terus bertambah hingga total ada 35 pekerjanya.

Selain itu, BUMDesa Ijen Lestari juga menyediakan guide lokal dan penyewaan kendaraan untuk wisatawan menuju daerah Ijen. Sinergi ini juga dibangun karena adanya jaringan dengan agen travel di luar Kab. Banyuwangi sehingga jika ada wisatawan hendak mengunjungi Gunung Ijen bisa langsung menghubungi pihak BUMDesa.

Informasi terakhir, ada rencana dikembangkan beberapa unit usaha baru diantaranya pengelolaan sendang dan koperasi transportasi.

“Semua unit usaha adalah berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dan harus berdampak secara langsung kepada masyarakat,” ujar Kepala Desa yang dikuatkan oleh penjelasan Bambang.

Unit-unit usaha lainnya yang dimiliki oleh BUMDesa Ijen Lestari diantaranya ada POM Mini, KSU, dan warung makan.

Desa mempunyai potensi dan telah ada embrio pengelolaan sebelumnya, yaitu retribusi wisata. Bahwa dengan adanya payung hukum BUMDesa semakin



menguatkan legalitas formal atas retribusi dimaksud.

Beorientasi pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat, sehingga masyarakat diuntungkan dengan adanya BUMDesa, contoh dalam pengelolaan homestay milik masyarakat dan packaging produk UMKM, serta kontribusi PAD bagi pembangunan desa.

Kontribusi besar dari pemerintah bagi pengembangan BUMDesa dimulai dari langkah komitmen nyata yang dibuktikan adanya penyertaan modal BUMDesa tahun 2016 melalui

yang mendorong berdirinya Bumdesa. Kalau dilihat dalam kasus Tamansari, figur pak Bambang sebagai tokoh masyarakat dan Kepala Desa adalah dua aktor utama yang berkontribusi menggerakkan masyarakat dalam pendirian dan pengembangan modal sosial menjadi sangat penting, dengan mengesampingkan faktor kepentingan pribadi demi kepentingan desa. Artinya penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk menemukan figur-figur kunci penggerak kegiatan ini terlaksana.(ara)

SITUBONDO - Kekurangan fisik tak menyurutkan semangat untuk terus menyambung hidup seorang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di Situbondo. Ibu Surinap (65) namanya, seorang tunanetra yang tak kenal lelah berjuang hidup meski dengan kekurangannya.

Ia berjualan kerupuk bawang sejak 10 tahun lalu, saat dirinya ditinggalkan suami untuk selama-lamanya. Dibantu putrinya, Ibu yang tinggal di Dusun Krajan Desa Sumberejo Situbondo ini menjalankan usahanya dengan modal pas-pasan. Karena keterbatasannya, jika putrinya sudah menggoreng kerupuk mentah, Ibu Surinap dengan cara meraba-raba dan menghitung 3 butir kerupuk lalu di masukan ke dalam kantong plastik yang berukuran ½ kg.

Setelah proses memasukkan kerupuk ke plastik, putrinya kemudian merekatkan plastik menggunakan lilin. Harga 1 bungkus kerupuk ini hanya Rp 500. Kerupuk ini kemudian dijual oleh anak-anaknya dari warung ke warung sesuai permintaan.

"Satu pak kerupuk mentah itu harganya Rp 60 ribu, jika dikemas semua hanya mendapatkan laba Rp

Jalin Matra Bantu Penjual Kerupuk Bawang Tunanetra



25 ribu dalam 2 hari," ujar Surinap. Jika ada pesanan, katanya, bisa mendapatkan laba sampai Rp 40 ribu. Selama ini, Surinap sudah memiliki langganan yang cukup banyak, mulai dari penjual lontong balap, penjual pangsit, penjual rujak, dan penjual bakso. "Pendapatan ini sudah cukup besar bagi seorang tuna netra seperti saya," katanya.

Surinap bukanlah seorang yang hanya berpangku tangan dan menggantungkan hidup dari anak-anaknya, namun justru bekerjasama dan guyub. Jika

putrinya sedang bekerja, Surinap mengerjakan pekerjaan rumah mulai menyapu dan ke kamar mandi, seakan ia mampu melihat seperti orang yang sempurna.

Ia juga bersyukur karena telah mendapatkan bantuan modal dari Program Jalin Matra. Sebab selama ini ia berkeinginan mengembangkan usahanya. Tak hanya berjualan kerupuk, tetapi juga bisa membuat dan berjualan keripik. "Semoga bantuan dari Jalin Matra ini bisa mewujudkan keinginan saya," tuturnya. (**umi hayrunnisa/red**)

Jalin Matra Dukung Usaha Warung Soto KRTP di Sumenep

Sumenep - Di Desa Sergang Kecamatan Batu Putih wilayah Utara Kabupaten Sumenep, hampir banyak ditemui sosok Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang mempunyai banyak tanggungan. Salah satunya, Hosniyah (55th).

Warga Dusun Gunung Timur Kecamatan Batu Putih Sumenep ini mempunyai tanggungan 2 orang anak 1 ibu kandung dan 1 saudara dari ibu kandungnya (Adik ibunya). Anak pertama sekolah kelas 3 SMA, dan anak yang bungsu baru masuk SMP.

Hosniyah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan soto. Ia membuka warung kecil di sekitar desanya dengan tempat yang tidak menyewa namun dengan cara berbagi hasil. Meskipun hasil yang dia dapat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun



Hosniyah tetap bersemangat dan sabar menjalankan usahanya.

Usaha menjual soto dilakukan Hosniyah sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, tepatnya ketika anak kedua mereka lahir. Suaminya meninggal karena sakit demam selama tiga hari.

Hosniyah sangat terpukul karena ia menilai kematian suaminya cukup mendadak.

Untuk pembagian hasil dalam usahanya menjual soto dengan pemilik warung, diwujudkan berupa setengah kwintal beras setiap panen. Maklum, selain sebagai penjual soto, Hosniyah juga mengerjakan sawah pemilik warung tersebut.

"Memang tidak jelas berapa hasil total sebelum dibagi. Luas sawah saya garap tidak dalam ukuran hektar dan paling-paling hanya dalam ukuran tumbak," ujarnya. (*)

Jasa Jahit Rubiah Dapat Dukungan Jalin Matra PFK

BANYUWANGI - Kehidupan dengan penuh keterbatasan utamanya dalam hal ekonomi tentu tidak diinginkan setiap orang. Dibutuhkan kesabaran dan kecakapan untuk menjalaninya sehingga bisa keluar dari kemelut kehidupan yang sulit.

Hal inilah yang dilakukan seorang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) bernama Siti Rubiah (50) yang dengan segala keterbatasan ekonomi ia terus berjuang untuk mensejahterakan keluarga dan anak-anaknya. "Saya harus bekerja tiap hari agar keluarga dan anak cucu saya bisa sekolah dan berharap kehidupan keluarga kami berubah," ujar Rubiah.

Rubiah menjalani kehidupannya dengan membuka jasa jahit baju dan seragam sekolah untuk menghidupi keluarga. Perempuan yang tinggal di Dusun Krajan, Desa Kalirejo,

Kecamatan Kabat Banyuwangi ini tinggal bersama empat anak, dua cucu dan satu menantu. Sejak tahun 2007 Rubiah ditelan/arkan suaminya yang tidak ada kabarnya hingga kini. Sejak saat itu pula Rubiah menafkahi dan menyekolahkan anak-anaknya seorang diri.

Di usia yang sudah memasuki kepala lima, Rubiah masih semangat menjalankan usahanya. "Syukur alhamdulillah dalam sebulan pendapatannya saget satu juta sampai satu juta dua ratus, di cukup – cukupin pokoknya untuk keperluan sehari hari dan tambahan biaya sekolah anak dan cucu," katanya penuh optimisme.

Rubiah pun mendapat bantuan usaha dari Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan itu diharapkan bisa mendukung jasa jahit yang dijalankannya. "Saya bersyukur



sekali, Inshaallah nanti saya gunakan beli mesin jahit lagi dan alat – alat yang lainnya," katanya.

Rubiah juga berkeinginan memproduksi kerudung dan busana muslim untuk dijual di pasaran. Ini dilakukan karena ia melihat banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan kerudung atau hijab.

"Ini adalah usaha satu-satunya keluarga saya, karena itu perlu inovasi dan kreativitas, sehingga bantuan dari Jalin Matra ini jasa jahit saya semakin berkembang," tuturnya. (Alfiantejoe,red)

Wujudkan Desa Kepel Jadi Desa Mandiri

Sungkono, S. Sos., Kepala Desa Kepel berusia 38 tahun ini selalu mengedepankan kesejahteraan warga Desa Kepel dengan cara yang efektif. Ia mulai menjabat menjadi kepala desa di tahun 2009 hingga saat ini.

Pada tahun 2009, Sungkono terpilih menjadi kepala desa di Desa Kepel hingga saat ini. Kala itu, ia termasuk sebagai kepala desa termuda di Kab. Madiun. Berangkat dari kegelisahannya menjadi pemuda desa yang tidak melihat ada perkembangan di lingkungannya, Sungkono bersama dengan perangkat desa dan warganya bergotong royong membangun Desa Kepel menjadi desa yang terstruktur baik dari segi administrasi pemerintahannya maupun dari segi inovasi daerahnya.

Tidak ada

cara-cara khusus bagi Sungkono untuk menggerakkan warga Desa Kepel menjadi warga yang gotong royong dan guyub. Ia hanya menjalankan sistem yang ada dengan sederhana. Tetapi ia punya kata kunci untuk membangun sumber daya manusia yang inovatif dan kompak. “Kata kuncinya adalah demokratisasi di desa itu harus terbentuk. Dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat.”

Hal ini dikarenakan adanya transparansi anggaran maupun perencanaan program desa antara warga dengan perangkat desa. Mulai dari

perencanaan, Sungkono memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat, untuk menjadi pelaksana, yang akhirnya masyarakat sendiri yang menerima manfaatnya. Dukungan dari warga ada, dari kepala desa pun juga ada.

“Kalau itu sudah bisa diterapkan, kalau diajak kerja bakti 2-3 tahun mendatang, masih tetap mau. Karena mereka tahu dan ikut proses perencanaannya, sehingga paham bahwa anggaran biaya tidak sebanyak yang dibayangkan. Biar tidak ada yang iri dan menganggap bahwa kerja sama ini hanya untuk memperkaya satu pihak (pemerintah) saja,” katanya.

Setiap kali ada rapat pembahasan anggaran desa, Sungkono dan perangkat desa lainnya menyampaikan anggaran desa secara terbuka kepada warga. Sungkono juga mengajak pemuda-pemudi untuk belajar memasarkan produk unggulan dari Desa Kepel melalui media sosial secara sukarela. Ia selalu melibatkan pemuda-pemudi desa supaya pemuda-pemudi juga aktif melakukannya. Terbukti dengan sistem pemasaran pemuda-pemudi untuk melakukan terobosan baru melalui media sosial Instagram dan Facebook sebagai sarana promosi Desa Kepel.

“Salah satunya kita juga yang mem-viralkan Paidi, petani porang yang sukses. Dan sampai saat ini pun Paidi merasakan hasilnya. Sekarang dia banyak dicari orang untuk jadi guru dalam menanam porang.”

Sungkono juga berandai-andai, andaikata seluruh masyarakat tahu kebutuhan apa yang diperlukan



di desanya, yang paling krusial. Maka dana desa bisa tersalurkan dengan baik. Karena terkadang masih banyak desa-desa yang hanya menggunakan dana desa untuk membangun hal yang tidak terlalu mendesak. Dana desa tidak digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada. Hingga program ini, menurut Sungkono, perlu dikaji ulang untuk membaca permasalahan desa ada di mana, bukan karena berdasar keinginan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan potensi porang yang ada di Desa Kepel, Sungkono telah memikirkan rencana ke depannya tentang porang di Indonesia. Tidak hanya mengenai desanya saja. Hal inilah yang membuat warga desa juga bisa mengikuti himbauan Sungkono yang berdasarkan fakta.

Baginya, sebagai kepala desa, mengejar angka PAD untuk desa adalah hal yang bisa dinomorsekiankan. Bukan karena



tidak ingin membuat desanya maju dari segi ekonomi, melainkan perlunya ada perbaikan pola pikir tentang sistem PAD selama ini.

“Karena untuk menjadi desa yang mandiri itu perlu didukung dengan indikator-indikator

dari pemerintahnya, tata kelola keuangannya harus baik. Kalau kita berorientasi kepada mendapatkan PAD, sementara tata kelola kita tidak baik, non sense. tidak akan menjadi desa yang mandiri.” (ara)



Tidak Kerepotan Meski Jadi Guru



MENGAWALI karir sebagai guru SD di SDN 1 Sanankerto Kec. Turen, sejak th 2003, Sulistyaningari, warga Desa Sanankerto ini merangkap sebagai sekretaris2 BUMDesa Kerto Raharjo Kab. Malang.

Kesehariannya mengajar, tidak membuat Sulis, sapaan akrabnya, tidak berkegiatan lain. Di samping mengajar, kesibukan Sulis ialah menjadi sekretaris 2 BUMDesa Kerto Raharjo Desa Sanankerto Kab. Malang. Sejak berdirinya BUMDesa Kerto Raharjo pada tahun 2016, Sulis bertekad ingin menjadi bagian dari perangkat BUMDesa di desanya sendiri.

“Saya ingin membantu program yang ada di desa karena program BUMDesa bagi saya adalah sesuatu yang baru,” tutur Sulis.

Di kegiatan BUMDesa, tugas Sulis sebagai sekretaris 2 tidak bisa dianggap enteng. Selama ini Sulislah yang menganalisis keuangan BUMDesa Kerto Raharjo, hingga

BUMDesa Kerto Raharjo masuk ke dalam 10 pilot project ekowisata di Indonesia.

Sulis dipilih menjadi sekretaris 2 BUMDesa karena adanya dukungan dari perangkat desa yang saat itu tengah membentuk perangkat BUMDesa melalui musyawarah desa. Sulis berbangga hati bisa menjadi salah satu bagian dari perangkat BUMDesa Kerto Raharjo. Karena sebenarnya ia sejak dulu hanya mengajar dan

banyak belajar karena harus menganalisis keuangan setiap hari melalui bukti kas keluar (BKK) dan bukti kas masuk (BKM),” katanya.

Sulis mengakui, meski perangkat BUMDesa sudah terbentuk sejak 2016, namun baru aktif di tahun 2017 karena Sulis dan perangkat BUMDesa lainnya masih mencari jati diri seperti apa BUMDesa ini akan dikembangkan. Pada saat itulah Sulis juga masih belajar untuk



tidak terlibat dalam kegiatan perangkat desa. Namun seperti yang dikatakan Sulis, program BUMDesa menjadi hal yang baru untuknya, oleh karena itu inilah yang memicu Sulis untuk terus belajar. Selama ini, ia tidak pernah merasa tersita waktunya antara mengajar dan menjadi sekretaris BUMDesa. Ini karena manajemen waktu yang digunakan Sulis efektif untuk berkecimpung di kegiatan BUMDesa.

“Di BUMDesa saya harus

mengelola keuangan. Alhasil, berdirilah ekowisata bambu Boonpring Andeman. Selain mengelola ekowisata, BUMDesa Kerto Raharjo juga mengelola bank sampah, pengelolaan air bersih (PAB), agen BNI, serta UKM Kerajinan bambu. Ke depannya, Sulis ingin terus produktif dalam menjalankan program sesuai dengan master plan dan bersinergi dengan berbagai stakeholder yang punya korelasi dengan program-program BUMDesa.(ara)







Bakti Sosial Untuk Memupuk Jiwa Sosial

DINAS Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur menggelar Bakti Sosial di 4 lokasi pada 03 Desember di Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) di Kabupaten Jombang.

Bakti sosial yang menyalurkan bantuan ini menasar pada 4 lokasi di Kab. Jombang, diantaranya Desa Gumulan dan Desa Jatiduwur, Kec. Kesamben, Desa Cupak Kec. Ngusikan, dan Desa Jombatan Kec. Jombang.

Desa Gumulan Kecamatan Kesamben dipilih untuk menjadi pusat acara bakti sosial ini. Ada total 61 RTSM yang tercatat mendapatkan bantuan yang diserahkan langsung oleh Ketua



DWP Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Nuryani Mohammad Yasin. Selain berupa uang tunai, bantuan juga dibagikan paket-paket sembako.

“Dana bakti sosial dikumpulkan dari hasil sodaqoh anggota DWP serta karyawan dan karyawan Dinas PMD,” terangnya. Nuryani juga menjelaskan bahwa bakti sosial yang digelar sebagai bentuk sinergitas program antara Dinas PMD dengan Dharma Wanita Persatuan selaku mitra pemerintah untuk memupuk jiwa sosial dan jiwa kepedulian berbagi. Patut diacungi jempol, inisiatif anggota DWP maupun karyawan/karyawati Dinas PMD Provinsi Jawa Timur ini dirasa mampu memberikan manfaat bagi penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Nuryani

sempat berpesan kepada penerima Program Jalin Matra BRTSM, untuk lebih serius mengelola bantuan program dari Gubernur Jatim. “Modal usaha yang diberikan agar terus dikembangkan. Siapa tahu dari usaha yang kecil, suatu saat nanti akan menjadi besar dan pada saatnya nanti akan lahir pengusaha-pengusaha besar dari penerima bantuan Jalin Matra,” harapnya.

Jalin Matra BRTSM adalah salah satu dari 3 kegiatan Program Jalin Matra Pemprov Jawa Timur. Sudah lima tahun berjalan, Jalin Matra BRTSM telah menjangkau 48.143 rumah tangga sangat miskin dan 752 desa di seluruh Jawa Timur.

Sementara di kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), program ini

telah menjangkau hampir 87.000 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), adapun di kegiatan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), telah menjangkau 814 desa.

Program Jalin Matra ikut menyumbang penurunan angka kemiskinan pedesaan di Jatim. Data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada Maret 2019 menyebut, pada periode September 2018-Maret 2019, kemiskinan di pedesaan turun sebesar 171.070 orang (0,78%), sedangkan di perkotaan turun sebesar 8.820 (0,13%). Melalui kegiatan ini, adanya pemerataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat dalam menerima bantuan dari pemerintah. (ara)



Cemal Cemil Bola Ubi Kopong



AKHIR-akhir ini, banyak jajanan yang sedang hits muncul untuk memanjakan lidah pecinta kuliner. Kali ini, ada jajanan yang tidak perlu bahan rumit. Hanya berbekal beberapa bahan sederhana saja, bola ubi kopong dapat dibuat dengan cita rasa yang memanjakan lidah. Ada berbagai versi dalam membuat bola ubi ini. Biasanya kita mengenal bola ubi dengan isi gula merah yang lumer di lidah. Namun, ada pula bola ubi kopong yang tidak memiliki isi apa pun di dalamnya. Bola ubi kopong ini memiliki tekstur yang renyah saat digigit. Meski tak ada isi di dalamnya, rasa bola ubi kopong ini tak akan mengecewakan. Berikut cara membuat bola ubi untuk kudapan di waktu liburan Anda.

Bahan:

- ⇒ 700 gram ubi jalar.
- ⇒ 200 gram tepung tapioka.
- ⇒ 5 sendok makan gula pasir.
- ⇒ 3 sendok makan baking powder.
- ⇒ Minyak goreng secukupnya.

Cara Membuat:

1. Setelah semua bahan terkumpul, yuk kita langsung buat bola ubi kopong!
2. Cuci ubi jalar yang dan kupas kulitnya. Lalu, kukus ubi yang telah dikupas selama 15-20 menit hingga empuk.
3. Setelah dikukus, haluskan ubi tersebut hingga lembut menggunakan garpu atau alat masak lainnya.
4. Campurkan ubi jalar yang sudah lembut tadi dengan tepung tapioka, gula pasir, dan baking

powder. Lalu, aduk dengan tangan.

5. Setelah semua bahan bercampur, ambil sedikit demi sedikit dan bulat-bulatkan di tangan hingga berbentuk bola. Besar kecilnya sesuaikan dengan selera, tapi jangan terlalu besar.
6. Goreng di minyak dengan api medium. Api jangan terlalu besar karena bola ubi tersebut bisa cepat gosong. Bolak-balikan bola ubi yang sedang digoreng tersebut sambil ditekan-tekan agar tengahnya menjadi kopong.
7. Setelah cukup berwarna coklat, tiriskan. Bola ubi kopong pun siap dihidangkan.

Mudah banget kan? Tidak perlu kalian membeli jajanan ini di luar, karena dengan resep ini kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. (*)

RAPAT KOORDINASI PROGRAM INOVASI DESA (PID) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

BATU, 2-5 DESEMBER 2019



Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, Ir. Moh. Yasin, M. Si, foto bersama Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan (samping kiri), Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Prov. Jatim dalam acara penyerahan hadiah Kompetisi Inovasi Desa 2019 di The Singlasari Resort 2-5 Desember 2019. Selamat kepada para pemenang.